

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat 1, Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau biasa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diklasifikasikan kembali menjadi beberapa daerah yang berbentuk Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga Desa dan turunannya. Sehingga kekuasaan dalam sistem pemerintahan pun dibagi menjadi dua bagian, yakni pusat dan daerah. Tanpa daerah maka pusat akan kehilangan fungsinya sebagai penyokong, pun dengan daerah yang tanpa pusat akan berdampak pada kinerja serta pengambilan kebijakan pemerintahan daerah yang tidak optimal serta kecenderungan hal terburuk lain yang terjadi ketika pusat tidak mengambil peran. Hal ini sering disebut sebagai otonomi, berbeda dengan sistem negara bagian yang tidak ada hubungan sama sekali dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi hanya memberikan keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing bersama seluruh elemen masyarakat, namun tetap bertanggung jawab terhadap Pemerintahan Pusat.

Setiap daerah yang sudah diberikan hak otonomi bertanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing melalui program pembangunan ekonomi dengan atau tanpa bantuan dari pusat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi demokrasi dan kinerja daerah. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut, daerah perlu mengambil kebijakan dengan mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan sesuai dengan potensi ataupun sektor unggulan yang dimiliki daerah (Agus Tri Basuki, 2009). Kendatipun demikian, pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat menganalisis perubahan struktur ekonomi.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi daerah yang menjanjikan. Salah satu sektor yang paling menarik perhatian adalah sektor pariwisata. Objek-objek pariwisata yang ada di Sumatera Utara disinyalir mampu memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian daerah dan nasional jika dikelola lebih baik dan kreatif oleh daerah. Perkembangan teknologi dan kemajuan sistem yang terdisrupsi oleh digitalisasi membuat semua pihak harus benar-benar mampu menawarkan sesuatu yang spesial agar layak untuk dilirik oleh pangsa pasar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 2018, Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara berada pada angka 5,18% yang naik 0,06% dari tahun sebelumnya. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Edy Rahmayadi, memang sektor pariwisata begitu diperhatikan dengan baik. Terbukti dari data yang dikeluarkan BPS 2018 angka kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian Sumatera Utara dilihat dari jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang berada pada angka

48.571 yang naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 20.300 unit saja.

Namun, walaupun begitu dengan kekayaan sektor pariwisata Sumatera Utara masih dirasa mampu bertumbuh lebih dari nilai kontribusi yang saat ini. Untuk itu sangat penting bagi daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan dengan fenomena ekonomi yang terjadi saat ini. Sebut saja era disrupsi yang belakangan sangat diperbincangkan di segala lini. Hampir semua sistem diperkirakan akan diganti oleh *digitalisasi*. Namun walaupun begitu, bukan berarti kekayaan Sumber Daya Alam dan Kebudayaan Indonesia juga harus seratus persen di *remake*, akan tetapi sifat sistemisasi yang adaptif akan mendukung pertumbuhan di segala sektor.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah setempat untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kerjasama atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru dan menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah agar berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yakni untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja serta daya saing untuk masyarakat daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah di mana sumber daya yang ada harus mampu mengukur atau menaksir potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Arsyad,

1999). Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Dodik (2012), Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah.

Membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri merupakan tujuan pokok dari pembangunan ekonomi (Jhingan, 1992:420). Modal juga diperlukan untuk mendirikan berbagai fasilitas infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan non basis. Dimana sektor basis artinya setiap aktivitas masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional (Hendayana, 2003 dalam Elsjamina, 2014).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara akan semakin jelas terarah, terukur dan sesuai target jika pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat menggunakan serta menerapkan secara optimal paradigma pembangunan wilayah *Endogenous Development Strategy* yang memadukan faktor *endowments* (modal pembangunan *secondary resources*) dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dikembangkan secara berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk membuka peluang investasi dan

menciptakan efek pengganda secara *forward-backward linkage* yang menuju pada kesejahteraan sosial (Purwanti, 2008).

Endogenous Development Strategy merupakan strategi pembangunan yang memanfaatkan karakteristik wilayah yang dipadukan dengan pembangunan Sumber Daya Alam dengan menggali, menemukan dan menetapkan potensi-potensi pembangunan daerah (sektor dan produk unggulan) yang dapat menjadi sebuah kekuatan dan faktor pendorong pembangunan. Penggalan potensi ini sangatlah penting karena diharapkan pembangunan menjadi lebih fokus untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. Selain itu, segala potensi yang telah berhasil digali akan dapat “dijual” kepada para investor (Purwanti, 2008). Negara selalu menuntut pemerintah untuk kreatif dalam mengembangkan perekonomian dan investasi swasta yang diharapkan mampu untuk memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Dengan keberadaan investasi inilah yang akan mendorong pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi pada sektor lainnya. Jumlah penduduk terus bertambah, itu artinya kebutuhan ekonomi juga pasti bertambah. Sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan dan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan tambahan sebagai akibat dari kebutuhan ekonomi yang bertambah dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. (Tambunan, 2001:2 dalam Dodik 2012).

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (2018), Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia dibagi dalam 17 sektor ekonomi belum termasuk sub sektor masing-masing, antara lain: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan besar, eceran dan Reparasi mobil, sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Sama halnya dengan provinsi lain di Indonesia, Sumatera Utara menerapkan salah satu indikator sektor unggulan dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana besarnya PDRB diperoleh dari jumlah seluruh nilai tambah dari produk barang maupun jasa yang di ukur dari berbagai aktivitas perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 yakni 331.085.237,47 juta. Dan setiap tahun nya mengalami peningkatan dalam angka selama kurun waktu sembilan tahun hingga 2018 lalu. Serta diharapkan juga akan tetap mengalami peningkatan yang signifikan di tahun-tahun yang akan datang. Namun, setelah dihitung nilai kontribusi angka-angka tersebut dalam persentase ternyata setiap dua tahun sekali mengalami penurunan yang akan ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Pertumbuhan dari nilai PDRB selama sembilan tahun tersebut didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dimana sektor ini memberikan kontribusi rata-rata 24,9% setiap tahun nya dari total PDRB. Sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya terhadap PDRB yakni Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata 0,09% setiap tahun nya.

Nilai dan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang besar akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Sumatera Utara. Dibawah ini adalah data PDRB atas harga konstan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2018 yang telah diklasifikasikan menjadi tiga sektor ekonomi utama untuk mempermudah penulis melihat bahwa apakah angka-angka yang meningkat setiap tahun nya benar-benar selaras dengan peningkatan PDRB secara total :

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Dengan Klasifikasi 3 Sektor Ekonomi Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sampai 2018 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Total PDRB	Sektor Ekonomi Primer		Sektor Ekonomi Sekunder		Sektor Ekonomi Tersier	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
2010	331.085.237,47	88.897.484,2	26,85	110.009.576	33,22	132.178.177	39,92
2011	353.147.591,20	94.286.538,02	26,69	115.644.321,94	32,74	143.216.731,23	40,55
2012	375.924.139,45	99.540.672,1	26,47	122.547.840	32,59	153.835.627	40,92
2013	398.727.142,80	105.106.213,73	26,36	129.698.242,23	32,52	163.922.686,84	41,11
2014	419.573.308,67	109.743.204	26,15	135.457.592	32,28	174.372.513	41,56
2015	440.955.852,47	115.880.939,34	26,27	141.583.733,12	32,10	183.491.180,01	41,61
2016	463.775.464,86	121.324.685	26,16	149.036.240	32,13	193.414.540	41,70
2017	487.531.231,87	127.740.582,61	26,20	155.106.141,03	31,81	204.684.508,23	41,98
2018	512.765.628,04	133.994.661	26,13	161.865.902	31,56	216.905.065	42,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Data diolah)

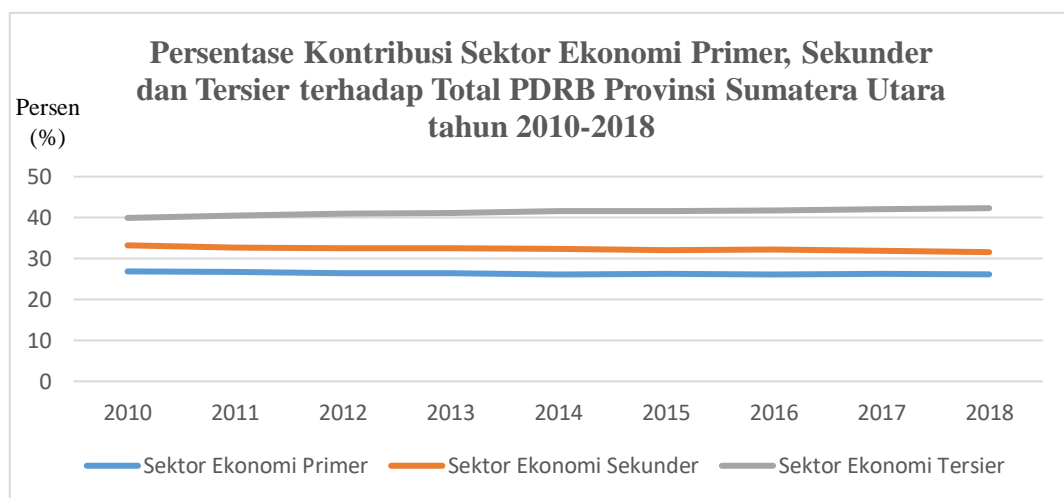
Keterangan

a) Sektor Ekonomi Primer (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan penggalian).

b) Sektor Ekonomi Sekunder (Industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi).

c) Sektor Ekonomi Tersier (Perdagangan besar, eceran dan Reparasi mobil, sepeda motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya).

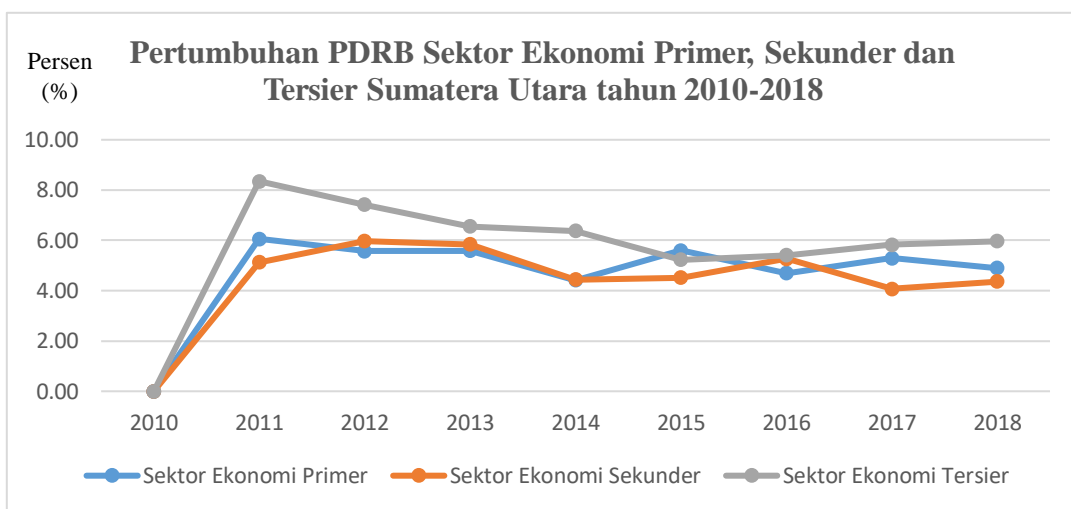
Nilai dan kontribusi yang ditunjukkan oleh beberapa sektor yang diklasifikasikan menjadi tiga sektor ekonomi (primer, sekunder dan tersier) sangat jelas menunjukkan kecenderungan penurunan sektor primer dan sekunder dari tahun ke tahun, namun kontradiktif dengan sektor tersier yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 ke 2011, sektor primer mengalami penurunan sekitar 0,06% dan itu terus terjadi dua tahun sekali hingga tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 0,03% dari tahun sebelumnya. Sektor sekunder juga mengalami hal yang sedikit mirip dengan sektor primer. Sekilas melihat data yang disajikan menunjukkan kondisi yang positif dari pertumbuhannya, tapi setelah dilihat dari persentase kontribusi sektor primer tersebut terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dan stagnasi yang setiap tahun terjadi. Kondisi ini tentunya kurang baik dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, mengingat sektor primer atau basis merupakan sektor yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pengelolaan di daerah. Secara grafik akan ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar 1.1 Grafik Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Primer, Sekunder dan Tersier Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa kontribusi PDRB di sektor ekonomi primer berada di bawah sektor ekonomi sekunder dan tersier. Grafik tersebut menggambarkan stagnansi sekaligus kecenderungan penurunan nilai dari tahun ke tahun. Selain itu kondisi pertumbuhan PDRB sektor ekonomi utama (primer, sekunder dan tersier) juga akan ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Primer, Sekunder dan Tersier Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018

Dari grafik di atas kita juga dapat melihat bahwa pertumbuhan PDRB di sektor ekonomi primer berada di antara sektor ekonomi sekunder dan tersier. Khususnya mendekati tahun akhir analisis yaitu dari tahun 2016-2018. Sektor ekonomi tersier secara konsisten menempati posisi paling atas walaupun tetap terjadi penurunan nilai dari tahun ke tahun. Namun, dari tahun 2016, sektor ini justru merembet naik kembali hingga tahun akhir analisis. Berbeda dengan sektor ekonomi sekunder, yang mengalami penurunan nilai di tahun 2016 ke 2017. Tapi pada tahun 2018, sektor ini kembali memperbaiki nilai pertumbuhannya.

Selain pertumbuhan sebagai salah satu dimensi pokok dalam pembangunan, perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi juga merupakan salah satu dimensi pokok lainnya yang punya pengaruh besar dalam pembangunan ekonomi. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 1999). Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) menurunnya pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) juga memberikan kontribusi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1999). Jika diperhatikan dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, pada kenyataannya tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Artinya laju pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja, sehingga titik balik untuk aktivitas ekonomi tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan tenaga kerja (Supriyati dan Sumedi, 2001).

Pertumbuhan ekonomi nasional mempunyai pengaruh atas struktur ekonomi daerah karena pertumbuhan nasional mempunyai pengaruh atas pertumbuhan daerah, sebab daerah merupakan bagian internal tak terpisahkan dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional. Pembangunan yang berorientasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang menyebabkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah menjadi lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat pada variabel seperti pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan

nilai tambah sebagai proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian selama kurun waktu tertentu. Struktur ekonomi daerah berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun disisi lain terdapat juga beberapa sektor yang dinilai kurang menguntungkan atau kontribusinya relatif rendah terhadap PDRB. Selain itu, dengan adanya inventarisasi sektor-sektor ekonomi di Sumatera Utara akan membantu pemerintah daerah untuk mengatur skala prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai berbagai permasalahan yakni dalam menentukan sektor basis dan non basis, perubahan struktur ekonomi serta bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dengan judul penelitian **“ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dibahas sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis (unggulan) dan non basis perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2018?
2. Adakah perubahan struktur perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui sektor basis (unggulan) dan non basis perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2018.
2. Untuk mengetahui adanya perubahan struktur perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2018

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu dan terapan ilmu:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ekonomi Regional dan juga Ekonomi Publik yang saling terkait. Karena penelitian ini membahas tentang analisis mengenai sektor-sektor unggulan suatu wilayah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang yang sama ataupun berbeda serta penelitian selanjutnya.

2. Aplikasi:

A. Bagi Lembaga Pemerintah (Pemerintah Daerah)

Sebagai bahan untuk Pemerintah Daerah dalam pemetaan pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui inventarisasi sektor-sektor unggulan di Provinsi Sumatera Utara.

B. Bagi Masyarakat Sumatera Utara

Sebagai bahan informasi dan referensi di dalam mengkoreksi kinerja pemerintah serta untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi daerahnya.

C. Bagi Pihak Swasta Lokal dan Asing serta Pengembang

Sebagai bahan informasi dalam penentuan kerjasama ekonomi Regional maupun Internasional di berbagai sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan.

3. Bagi Penulis

Sebagai syarat penyelesaian studi ekonomi pembangunan S1 dan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman khususnya dalam menganalisis ekonomi suatu wilayah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Juga dapat menerapkan pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan tinggi.

